

TINJAUAN ATAS PENGHAPUSAN BONGKARAN BARANG MILIK NEGARA KARENA PERBAIKAN (RENOVASI) PADA KPKNL PEMATANGSIANTAR

Weinber Manurung

Program Studi D3 Manajemen Aset, PKN STAN

E-mail: manurung.weinber1@gmail.com

Abstrak: Seluruh Barang Milik Negara (BMN) berupa bangunan memiliki masa manfaat. Bangunan-bangunan tersebut perlu diperbaiki (direnovasi) untuk mempertahankan fungsinya, sama halnya dengan rumah dinas pada KPKNL Pematangsiantar yang dilakukan renovasi. Dari hasil perbaikan (renovasi) ini akan muncul sisa bongkaran yang dapat dioptimalisasi menjadi PNBPN dengan cara dijual melalui skema lelang pada KPKNL Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur pelaksanaan penghapusan bongkaran BMN pada KPKNL Pematangsiantar, kendala yang terjadi saat pelaksanaan penghapusan, dan upaya untuk mengatasi kendala-kendala tersebut. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode wawancara dan studi kepustakaan. Narasumber yang diwawancara merupakan pegawai yang bertugas sebagai pemohon lelang bongkaran tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, penulis membandingkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, dan Surat Edaran Kementerian Keuangan Nomor Nomor SE-4/KN/2012 dengan proses yang telah dilakukan KPKNL Pematangsiantar. Dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa KPKNL Pematangsiantar telah melakukan proses penghapusan sesuai dengan peraturan yang berlaku. KPKNL Pematangsiantar masih mendapati beberapa kendala dalam proses penghapusan bongkaran BMN. Namun, pihak KPKNL Pematangsiantar telah melakukan berbagai upaya untuk mengatasinya.

Kata kunci: Bongkaran, Renovasi, Penghapusan BMN

Abstract: All-State Property (BMN) in the form of buildings has a useful life. These buildings need to be repaired (renovated) to maintain their function, as is the case with the official house at the KPKNL Pematangsiantar which was renovated. From the results of this repair (renovation) will emerge the rest of the demolition that can be optimized into PNBPN by selling it through an auction scheme at the KPKNL Pematangsiantar. This study aims to determine the procedure for implementing the removal of BMN disassembly at KPKNL Pematangsiantar, the obstacles that occurred during the implementation of the removal, and efforts to overcome these obstacles. In this research, the writer uses interview methods and literature study. The interviewees were employees who served as applicants for the demolition auction. Based on the study's results, the authors compared the Regulation of the Minister of Finance Number 111/PMK.06/2016, Regulation of the Minister of Finance Number 83/PMK.06/2016, and the Circular Letter of the Ministry of Finance Number SE-4/KN/2012 with the process carried out by the KPKNL

Pematangsiantar. This study found that the Pematangsiantar had carried out the deletion process in accordance with applicable regulations. KPKNL Pematangsiantar still encounters several obstacles in the process of removing BMN demolition.KPKNL Pematangsiantar has made various efforts to overcome this.

Keywords: Demolition of buildings, Renovation, Elimination of State Property